

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Setelah melaksanakan praktik kerja profesi apoteker di apotek maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Mahasiswa calon apoteker mendapatkan pemahaman mengenai praktik pelayanan kefarmasian di apotek, termasuk peran serta tanggung jawab seorang apoteker komunitas.
2. Mahasiswa memperoleh pengalaman langsung dalam melaksanakan pelayanan manajerial dan klinis di apotek sesuai standar profesi, kode etik kefarmasian, dan prinsip berorientasi pada pasien.
3. Memperoleh pengalaman di lapangan dalam merencanakan, mengadakan serta mendistribusikan sediaan farmasi.
4. Mahasiwa calon apoteker mampu mengembangkan kemampuan *soft skill* dan *hard skill* melalui pelayanan yang ada di apotek.

5.2 Saran

Setelah melaksanakan praktik kerja profesi apoteker di apotek maka saran yang dapat diberikan pada calon apoteker adalah sebagai berikut:

1. Sebelum mengikuti PKPA, mahasiwa calon apteker perlu melakukan persiapan dengan memahami teori terkait praktik manajerial maupun klinis, serta mempelajari aspek hukum dan etika. Hal ini penting agar proses diskusi dan bimbingan dapat berlangsung dengan baik serta dapat diterapkan secara tepat.
2. Mahasiwa PKPA juga perlu memiliki keberanian dan rasa percaya diri saat berinteraksi dengan pasien, disertai keterampilan

komunikasi serta kompetensi kefarmasian, sehingga mampu memberikan pelayanan yang tepat dan profesional kepada pasien

DAFTAR PUSTAKA

- American Society of Health System Pharmacists, 2011, AHFS Drug Information, United States of America.
- Badan Pengawasan Obat dan Makanan 2019, Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 32 Tahun 2019 tentang Persyaratan Keamanan dan Mutu Obat Tradisional, Jakarta.
- Badan Pengawas Obat dan Makanan. 2023, Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat Kuasi, Jakarta.
- Badan Pengawas Obat dan Makanan. 2020, Pedoman Teknis Cara Distribusi Obat yang Baik, Jakarta.
- Badan Pengawas Obat dan Makanan. 2021, Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pengawasan Pengelolaan Obat, Bahan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian, Jakarta.
- Badan Pengawas Obat dan Makanan. 2022, Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penarikan dan Pemusnahan Obat yang Tidak Memenuhi Standar dan/atau Persyaratan Keamanan, Khasiat, Mutu, dan Label, Jakarta.
- Baxter, S. 2010, Stockley Drug Interaction Ninth Edition, USA: Pharmaceutical Press.
- BNF, 2023, BNF 84 March - September 2023, BMJ Group and Pharmaceutical Press, London.
- BNFC, 2023, BNF For Children (BNFC) 2022-2023, BMJ Group and Pharmaceutical Press, London.
- Brayfield, A. 2009, Martindale the Complete Drug Reference 36th Edition. Pharmaceutical Press, London.
- Chrousos, G.P. 2018, 'Adrenocorticosteroids & Adrenocortical Antagonists', in Katzung, B.G., Basic & Clinical Pharmacology, 14th ed., McGraw Hill, USA.
- Departemen Kesehatan RI. 2007, Pedoman Penggunaan Obat Bebas dan Bebas Terbatas, Jakarta: Departemen Kesehatan Republik Indonesia.
- Katzung, B.G. and Vanderah, T.W. 2012, Basic & Clinical Pharmacology, 12th ed., McGraw-Hill Education, USA.

- Kementerian Kesehatan RI. 2019, Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, Jakarta.
- Kemenkes RI, 2014, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk 103 pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan, Jakarta.
- Kemenkes RI. 1993, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 919/Menkes/Per/X/1993 tentang Kriteria Obat yang Dapat Diserahkan Tanpa Resep, Jakarta: Republik Indonesia.
- Kemenkes RI. 1993, Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 925/MENKES/PER/X/1993 tentang Daftar Perubahan Golongan Obat No. 1, Jakarta: Republik Indonesia.
- Kemenkes RI. 1997, Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 1527/Men.Kes/SK/XII/1997 tentang Daftar Perubahan Golongan Obat No. 2, Jakarta: Republik Indonesia.
- Kemenkes RI. 1999, Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 1175/Menkes/SK/X/1999 tentang Daftar Perubahan Golongan Obat No. 3, Jakarta: Republik Indonesia.
- Kemenkes RI. 2016, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, Jakarta: Republik Indonesia.
- Kemenkes RI. 2022, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan, Pembatasan, dan Kategori Obat, Jakarta: Republik Indonesia.
- Kemenkes RI, 2023, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 tahun 2023 tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Psikotropika, Jakarta.
- Kemenkes RI, 2024, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 tentang Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi, Jakarta.
- Kemenkes RI, 2025, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 tahun 2025 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, Jakarta